

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN (SIMEKA) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI**

Chintia

NPP. 32.0183

Asdaf Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: 32.0183@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Ika Sartika, MT

ABSTRACT

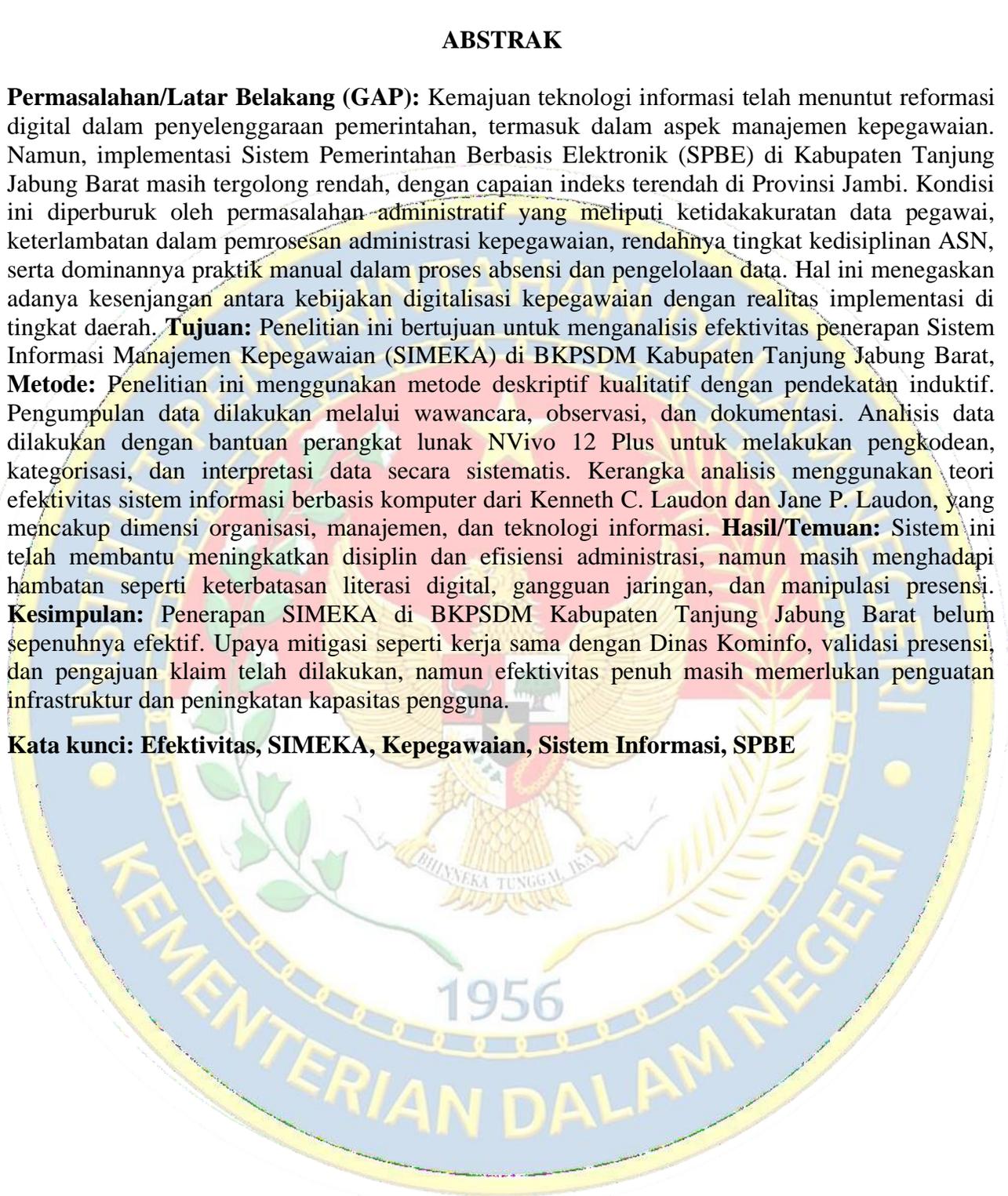
Problem Statement/Background (GAP): *The advancement of information technology has necessitated digital reforms in public administration, including in civil service management. However, the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Tanjung Jabung Barat Regency remains relatively low, with the lowest index among regencies in Jambi Province. This situation is exacerbated by administrative issues such as inaccurate employee data, delays in personnel administration processes, low levels of civil servant discipline, and the continued reliance on manual systems for attendance and data management. These conditions highlight a gap between the policy objective of digitizing personnel management and its practical implementation at the regional level. Purpose:* This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Civil Service Management Information System (SIMEKA) at the Regional Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Tanjung Jabung Barat Regency. **Method:** This research employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using NVivo 12 Plus software to facilitate systematic coding, categorization, and interpretation. The analytical framework is based on the theory of computer-based information system effectiveness proposed by Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, encompassing organizational, managerial, and technological dimensions. **Result:** While the system has contributed to improving employee discipline and administrative efficiency, it still faces several challenges, including limited digital literacy, network disruptions, and the potential for attendance manipulation. **Conclusion:** The implementation of the SIMEKA system at the Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Tanjung Jabung Barat Regency has not yet achieved full effectiveness. Mitigation efforts, such as collaboration with the Department of Communication and Informatics (Kominfo), attendance validation, and claim submission mechanisms, have been undertaken. However, full effectiveness requires further strengthening of infrastructure and enhancement of user capacity.

Keywords: *Effectiveness, SIMEKA, Civil Service Management, Information System, Electronic-Based Government System (SPBE)*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemajuan teknologi informasi telah menuntut reformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam aspek manajemen kepegawaian. Namun, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih tergolong rendah, dengan capaian indeks terendah di Provinsi Jambi. Kondisi ini diperburuk oleh permasalahan administratif yang meliputi ketidakakuratan data pegawai, keterlambatan dalam pemrosesan administrasi kepegawaian, rendahnya tingkat kedisiplinan ASN, serta dominannya praktik manual dalam proses absensi dan pengelolaan data. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi kepegawaian dengan realitas implementasi di tingkat daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA) di BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat, **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk melakukan pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data secara sistematis. Kerangka analisis menggunakan teori efektivitas sistem informasi berbasis komputer dari Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon, yang mencakup dimensi organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. **Hasil/Temuan:** Sistem ini telah membantu meningkatkan disiplin dan efisiensi administrasi, namun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan literasi digital, gangguan jaringan, dan manipulasi presensi. **Kesimpulan:** Penerapan SIMEKA di BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya efektif. Upaya mitigasi seperti kerja sama dengan Dinas Kominfo, validasi presensi, dan pengajuan klaim telah dilakukan, namun efektivitas penuh masih memerlukan penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pengguna.

Kata kunci: Efektivitas, SIMEKA, Kepegawaian, Sistem Informasi, SPBE



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan Masyarakat. Teknologi computer dan internet di era sekarang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam penerapan sistem informasi (Rodikin Amelinda Safera, 2022). Era digitalisasi telah menghadirkan transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan teknologi tidak lagi dapat dihindari, terlebih dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Nugraha, 2018, pemerintahan berbasis digital elektronik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kepada publik, memperbaiki efektivitas dan efisiensi internal organisasi pemerintahan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi mengenai layanan publik. Salah satu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah dalam layanan kepegawaian. Dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia telah mencapai 4.465.768 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 211.255 orang dari tahun sebelumnya, dengan distribusi yang tersebar di instansi pemerintah daerah sebanyak 3.466.703 (78%) sedangkan yang bekerja pada instansi pusat berjumlah 999.065 (22%). Kompleksitas pengelolaan jumlah ASN yang besar ini menuntut adanya sistem manajemen yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Pengalaman dari Kota Cirebon dalam implementasi sistem serupa pada tahun 2022 (Hermawan, Pusparani and Solihudin, 2023) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada efektivitas strategi manajemen perubahan. Program sosialisasi bertahap, pelatihan berkelanjutan, dan sistem reward yang tepat terbukti efektif dalam mendorong adopsi sistem baru.

Provinsi Jambi secara umum memiliki tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bervariasi di setiap pemerintah daerahnya. Berdasarkan hasil evaluasi KEMENPANRB tahun 2023 (KEMENPANRB, 2024), Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki indeks SPBE sebesar 1,71 dengan predikat “kurang”. Angka ini merupakan angka paling rendah dalam lingkup provinsi Jambi. Keadaan ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi tantangan besar dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ika Sartika, 2023). Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki indeks SPBE sebesar 1,71 dengan predikat “kurang”. Angka ini merupakan angka paling rendah dalam lingkup provinsi Jambi. Keadaan ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi tantangan besar dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pengelolaan administrasi kepegawaian masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Berdasarkan statistik daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024, jumlah PNS tercatat sebanyak 3.478 orang pegawai yang terdiri dari pegawai perempuan sebanyak 1.894 orang dan pegawai laki-laki sebanyak 1.584 orang

tersebar di 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kompleksitas pengelolaan jumlah pegawai yang besar ini dipersulit dengan masih dominannya sistem administrasi manual, terutama dalam aspek pencatatan kehadiran pegawai.

Berdasarkan laporan kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2023, tingkat profesionalitas ASN Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rendah, ditunjukkan dengan angka indeks profesionalitas ASN sebesar 59,0 (kategori sangat rendah). Beberapa indikator yang menyebabkan rendahnya profesionalitas yaitu kesadaran ASN untuk berdisiplin rendah, kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam menegakkan kedisiplinan, kurangnya pengawasan terhadap kedisiplinan ASN, adanya budaya kerja bermalas-malasan sudah tertanam di lingkungan kerja, dan rendahnya minat pegawai untuk mengikuti diklat struktural. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas kerja, tetapi juga berdampak pada akurasi perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai.

Berdasarkan hasil audit internal BKPSDM tahun 2023, ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan data kepegawaian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu ketidakakuratan data pegawai, keterlambatan pemrosesan dokumen, kesalahan pencatatan kehadiran, dan masalah penilaian kinerja.

Dalam penerapannya selama satu tahun lebih ini, aplikasi SIMEKA ini menghadapi beberapa permasalahan, yaitu permasalahan teknis yang dapat berdasarkan komentar pengguna di Google Play Store tentang aplikasi ini. Kemudian, adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang paham mengenai penggunaan aplikasi ini juga menjadi masalah dalam penerapan aplikasi SIMEKA ini. Ketidapahaman pegawai salah satunya dapat dibuktikan dengan banyaknya pegawai yang klaim kehadiran tidak sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Bupati No 167 Tentang Pengefektifan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam SE tersebut, ditentukan kriteria klaim yang ditolak, yaitu foto gelap, foto di dalam kendaraan, foto latar polos, foto tanpa menunjukkan wajah, foto gangguan sinyal, dan foto hp yang difoto lagi. Contoh foto di dalam kendaraan, foto latar polos, dan foto ketika tidak berada di kantor.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, mengenai topik pembahasan yang sama dan dapat dijadikan acuan atau perbandingan untuk memecahkan permasalahan yang ditemui peneliti pada saat melakukan penelitian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meskipun lokus serta masalahnya tidak sama dan objek penelitiannya pun berbeda. Penelitian Alfia Ismail, M.Yusuf Alfian Rendra Anggoro, dan Muhiddin Daweng yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Pendidikan (Ismail, Anggoro and Daweng, 2024), menemukan bahwa Penerapan SIMPEG di BKPSDM Dinas Pendidikan Kota Makassar dinilai cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti belum optimalnya rekap data serta adanya perubahan data yang belum tertangani secara maksimal. Penelitian Nurlianti menemukan Penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Jambi dapat dikatakan telah berlangsung dengan efektif (Nurlianti, 2023). Penelitian Wilda Maulida, Rudiana, dan Jajang Sutisna menemukan bahwa Implementasi SIMPEG di BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya dinilai kurang efektif, karena masih terdapat pegawai yang belum memahami cara penggunaannya. Selain itu, kedalaman data belum sepenuhnya mendukung penilaian kinerja dan pengembangan karier pegawai, serta sejumlah fitur dalam Simpeg belum dimanfaatkan secara optimal (Maulida and Sutisna, 2023). Selanjutnya Penelitian Fridson Yudha

Samula menyimpulkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dinilai cukup efektif. Meski demikian, masih terdapat kendala, seperti kurangnya kesadaran pegawai dalam memasukkan data kinerja dan memperbarui informasi pribadi mereka (Samula, 2023). Berdasarkan hasil penelitian Angela Apulliza, Rahman Mulyawan, dan Agus Taryana tentang Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam Penginputan Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021, penulis menemukan bahwa Penggunaan aplikasi SIMPEG dalam penginputan data PNS di Dinas Perhubungan Kota Bandung belum berjalan efektif, karena beberapa indikator belum menunjukkan hasil optimal, seperti rendahnya pemahaman pegawai terhadap aplikasi, ketidaktepatan dalam pelaksanaannya, serta tujuan yang belum sepenuhnya tercapai (Angela Apulliza, 2021). Valcik, Sabharwal, dan Benavides (2021) menekankan bahwa efektivitas HRIS di sektor publik tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologinya, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut selaras dengan tujuan organisasi dan kebutuhan pengguna. Temuan ini relevan dengan penelitian terkait SIMEKA, yang juga bergantung pada dukungan kelembagaan serta penerimaan dan partisipasi pegawai dalam penggunaannya (Valcik, Sabharwal and Benavides, 2021). Wang dan Liao (2008) memvalidasi model DeLone dan McLean dalam mengukur keberhasilan sistem e-Government, dengan menekankan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan merupakan faktor utama yang memengaruhi kepuasan pengguna dan keberhasilan penggunaan sistem. Temuan ini relevan sebagai dasar evaluasi efektivitas penerapan SIMEKA dalam konteks pelayanan administrasi kepegawaian (Wang and Liao, 2008). Flores-Zúñiga (2020) meneliti keberhasilan pemerintahan digital dengan mengintegrasikan faktor implementasi dan adopsi sistem. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan sistem e-government tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan penerimaan pengguna. Temuan ini mendukung analisis efektivitas SIMEKA, yang juga memerlukan sinergi antara teknologi, struktur organisasi, dan perilaku pegawai (Yang and Wang, 2020). Hooda et al. (2022) meneliti pengaruh kepercayaan terhadap niat perilaku dan penggunaan aktual sistem e-government. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem dan penyedia layanan merupakan determinan penting dalam mendorong adopsi dan penggunaan layanan digital oleh pengguna. Temuan ini relevan dengan studi mengenai penerapan SIMEKA, di mana keberhasilan implementasi sistem informasi kepegawaian juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pegawai terhadap sistem dan institusi yang mengelolanya (Hooda et al., 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas efektivitas sistem informasi kepegawaian. Fokus penelitian ini secara spesifik ditujukan pada implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA) di BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara empiris merupakan daerah dengan indeks SPBE terendah di Provinsi Jambi. Kondisi ini menunjukkan urgensi yang tinggi dan belum banyak diteliti secara mendalam. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori-efektivitas sistem informasi berbasis komputer dari Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2017), yang mencakup dimensi organisasi, manajemen, dan teknologi, sebuah kerangka konseptual yang jarang digunakan dalam studi sejenis, khususnya pada konteks pemerintahan daerah. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan didukung oleh penggunaan perangkat lunak NVivo 12 Plus dalam proses analisis data, yang memberikan kedalaman analisis melalui pengkodean tematik dan visualisasi data kualitatif. Penulis juga mengungkapkannya secara detail

hambatan-hambatan yang bersifat teknis maupun non-teknis dalam penerapan SIMEKA, seperti keterbatasan literasi digital ASN, gangguan jaringan, dan manipulasi presensi, serta langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui regulasi internal dan kerja sama antarlembaga. Oleh karena itu, skripsi ini menghadirkan kebaruan tidak hanya dalam konteks lokasi dan pendekatan analitis, tetapi juga dalam memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan tata kelola kepegawaian digital yang adaptif dan responsif terhadap tantangan implementasi SPBE di tingkat lokal.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis efektivitas penerapan aplikasi SIMEKA dalam proses manajemen kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

I. METODE

Menurut Nurdin and Hartati (2019) yang dimaksud sebagai desain penelitian adalah rencana sistematis sebagai kerangka yang dibuat untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik. Pengertian deskriptif menurut (Sugiyono, 2018) dalam Asri and Julisman, 2022 yaitu: “Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial sebagaimana adanya, tanpa manipulasi, sehingga memungkinkan peneliti memahami konteks, makna, dan pengalaman dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan pendekatan induktif, penelitian berfokus pada pengembangan teori atau pola baru berdasarkan data empiris, terutama ketika fenomena yang diteliti belum banyak dipahami atau tidak memiliki teori yang mapan. Pendekatan ini juga fleksibel dalam pengumpulan data, menggunakan teknik seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, yang memungkinkan eksplorasi informasi secara mendalam. Selain itu, pendekatan ini sangat relevan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, seperti perilaku manusia, interaksi sosial, atau kebijakan tertentu, karena mampu menghasilkan data yang kaya dan kontekstual. Dengan fokus pada proses dan makna, penelitian ini memberikan deskripsi terperinci tentang bagaimana suatu fenomena terjadi dan mengapa fenomena tersebut bermakna bagi individu atau kelompok tertentu.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kabid Pengadaan Status dan Informasi Pegawai, Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program, dan Operator sekaligus Super Admin Aplikasi SIMEKA sebanyak 2 orang. Adapun pengumpulan data Kualitatif dilaksanakan dengan melakukan wawancara terhadap 7 orang informan dengan teknik triangulasi, yaitu digunakan untuk menguji daya dapat dipercaya sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Adapun analisisnya menggunakan teori efektivitas sistem informasi berbasis komputer yang digagas oleh Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2017) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem informasi dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu yang mencakup dimensi organisasi, manajemen, dan teknologi. Analisis data juga dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus, yaitu *software* yang mempunyai kemampuan analisis konten dokumen hingga menghasilkan data numerik yang dapat digunakan sebagai landasan dalam

membangun argumentasi untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk menghasilkan temua konsep atau teori baru.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus, yaitu sebuah software yang dikembangkan oleh QSR (Qualitative Solution and Research) International untuk mendukung proses analisis data kualitatif. Sebagai langkah awal dalam proses pengolahan data, peneliti menyusun representasi visual dalam bentuk *Mind Map* dengan memanfaatkan perangkat lunak NVivo 12 Plus. *Mind Map* ini berfungsi sebagai panduan konseptual yang merefleksikan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Mind map tersebut disusun merujuk pada teori Efektivitas Sistem Informasi Berbasis Komputer yang dikemukakan oleh Laudon dan Laudon (2017), sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.1. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem informasi berbasis komputer dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu aspek organisasi, aspek manajemen, dan aspek teknologi.



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12 Plus (2025)

Gambar 2.1

***Mind Map* Efektivitas Sistem Informasi Berbasis Komputer menurut Laudon & Laudon (2017)**

Teori yang dikemukakan oleh Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2017) digunakan sebagai landasan dalam proses pengkodean data (*coding*) menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. *Coding* dalam konteks ini merujuk pada proses pengorganisasian dan pengelompokan data berdasarkan tema-tema tertentu yang relevan dengan teori yang digunakan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diimpor ke dalam folder dalam NVivo 12 Plus, untuk selanjutnya diklasifikasikan dan dikelompokkan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Pada fitur coding dalam NVivo 12 Plus, dikenal struktur *parent code* dan *child code*, yang masing-masing berfungsi untuk menggambarkan hierarki tema dan subtema. Struktur ini memudahkan peneliti dalam mengklasifikasikan informasi secara sistematis dan mendalam menggunakan NVivo 12 Plus. Setelah tahap pengkodean selesai, data yang telah terkode akan dianalisis lebih lanjut dengan memanfaatkan berbagai fitur analisis yang tersedia dalam NVivo 12 Plus. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Dimensi Organisasi

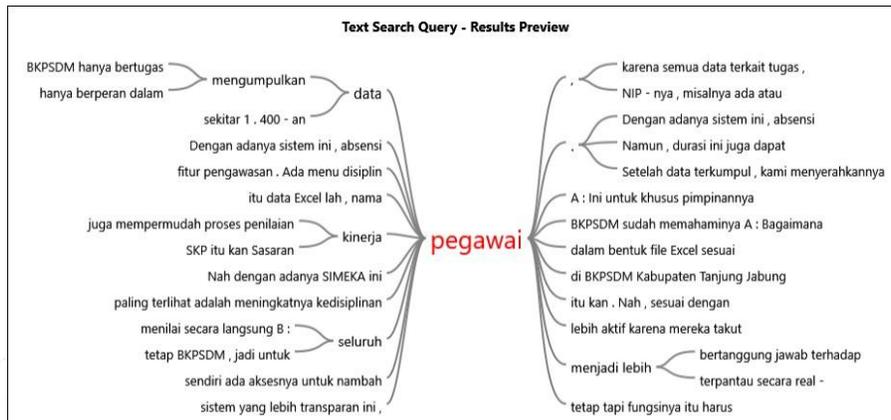
Dalam penelitian ini, dimensi organisasi mencakup lima indikator, yaitu sumber daya manusia, struktur organisasi, proses, aspek politik, dan budaya organisasi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti kemudian juga melakukan proses analisis dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus guna menarik kesimpulan. Dalam proses analisis menggunakan NVivo 12 Plus, data yang telah dikategorikan ke dalam nodes pada dimensi organisasi dianalisis lebih lanjut melalui fitur *Word Frequency Query*. Hasil dari analisis tersebut disajikan sebagai berikut:

| Word | Length | Count | Weighted Percentage (%) ▾ |
|-------------|--------|-------|---------------------------|
| pegawai | 7 | 14 | 1,07 |
| bkpsdm | 6 | 13 | 1,00 |
| kinerja | 7 | 11 | 0,84 |
| atasan | 6 | 8 | 0,61 |
| langsung | 8 | 7 | 0,54 |
| menggunakan | 11 | 7 | 0,54 |
| sesuai | 6 | 7 | 0,54 |
| kinerjanya | 10 | 6 | 0,46 |
| otomatis | 8 | 6 | 0,46 |
| pihak | 5 | 6 | 0,46 |
| sistem | 6 | 6 | 0,46 |

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12 Plus (2025)

Gambar 2.2
Word Frequency Query Dimensi Organisasi

Berdasarkan Gambar 2.2, hasil analisis menggunakan fitur *Word Frequency Query* menunjukkan bahwa kata “pegawai” menjadi yang paling sering muncul dengan persentase sebesar 1,07%. Disusul oleh kata “atasan” “BKPSDM” sebesar 1,00%, kemudian “kinerja” sebesar 0,84%, dan sebesar 0,61%. Frekuensi kemunculan kata-kata ini mengindikasikan bahwa pembahasan dalam data sangat berkaitan erat dengan peran pegawai dan kinerja mereka di lingkungan BKPSDM. Hasil ini diperoleh dari proses pengolahan dan analisis data yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, serta regulasi yang telah dimasukkan ke dalam perangkat lunak NVivo 12 Plus.



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12 Plus (2025)

Gambar 2.3
Text Search Query Kata Pegawai pada Dimesi Organisasi

Berdasarkan hasil analisis *Text Search Query* pada kata kunci "pegawai" menggunakan NVIVO 12 Plus, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi kepegawaian, khususnya melalui aplikasi SIMEKA, telah memberikan dampak positif terhadap dimensi organisasi. Hal ini tercermin dari meningkatnya kedisiplinan pegawai, keterlibatan aktif dalam pengisian data, serta kemudahan dalam proses penilaian kinerja dan pemantauan tugas secara real time. BKPSDM selaku pengelola sistem juga berperan dalam mengumpulkan data dan memastikan transparansi sistem yang mempermudah proses administrasi dan evaluasi pegawai. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi secara tepat dapat meningkatkan efektivitas kerja serta akuntabilitas pegawai di lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan uraian dari masing-masing indikator dalam dimensi organisasi menurut teori efektivitas sistem berbasis komputer dari Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2017), dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya efektif. Meskipun SIMEKA telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai dan efisiensi administrasi kepegawaian, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala. Sistem integrasi dengan pembayaran TPP memang berhasil mendorong kepatuhan pegawai, dan pencatatan data digital telah membantu meningkatkan transparansi serta mengurangi kesalahan administrasi. Namun, keterbatasan dalam kesiapan sumber daya manusia khususnya pada pegawai senior di awal penggunaan, minimnya pelatihan yang berkelanjutan, serta masih terbatasnya dukungan teknis menunjukkan bahwa efektivitas sistem belum optimal. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SIMEKA secara menyeluruh masih sangat bergantung pada peningkatan kapasitas pengguna dan penguatan infrastruktur pendukung.

3.2. Dimensi Manajemen

Peneliti melakukan analisis data menggunakan NVivo 12 Plus. Dalam proses analisis menggunakan NVivo 12 Plus, data yang diklasifikasikan ke dalam dimensi manajemen dianalisis lebih lanjut melalui fitur *Word Frequency Query*, sehingga menghasilkan temuan sebagai berikut:

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| admin | informasi | super | lengkap | seperti | bante | disini | keper | mendu | menes | mengam | mengam | mengam | menga |
| | lahirnya | | lokasi | | beker | efisien | keters | meny | panta | pema | pemus | penga | pengg |
| | | banyak | | titik | bentu | golong | langs | muda | pengis | profil | prosed | proses | riwaya |
| akses | melihat | | punya | | bkpsd | jabata | manaj | mulai | pengc | semu | setiap | setting | setting |
| | | kepegaw | | absens | | | | | | | | | |
| aksesnya | nambah | | sedikit | adminn | cepat | jabata | mempn | anya | permas | sendi | tangg | tepat | terorga |
| | | keputusa | | atasan | cukup | kenda | memp | pangk | prese | seora | temp | terset | unjapac |

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12 Plus (2025)

Gambar 2.4
Word Frequency Query Dimensi Manajemen

Berdasarkan Gambar 2.4, diketahui bahwa kata yang paling sering muncul adalah “Admin” dengan frekuensi sebesar 2,97%, diikuti oleh kata “Akses” sebanyak 1,27%, “Aksesnya” sebesar 1,27%, serta “Informasi” sebesar 1,27%. Visualisasi tersebut merupakan hasil pengolahan data yang bersumber dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dokumentasi, observasi, berita, regulasi, dan sumber relevan lainnya yang telah diperoleh peneliti. Temuan ini mencerminkan peran penting administrator dalam pengelolaan sistem informasi kepegawaian, serta menunjukkan bahwa aksesibilitas dan keterbukaan informasi menjadi aspek yang sering dibahas dalam konteks penerapan SIMEKA di BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12 Plus (2025)

Gambar 2.5
Text Search Query Kata Admin pada Dimensi Manajemen

Berdasarkan olahan *Text Search Query* pada Gambar 2.5, dapat disimpulkan bahwa peran admin, khususnya super admin, memegang posisi strategis dalam mendukung efektivitas sistem informasi yang diterapkan dalam pengelolaan kepegawaian. Ditemukan bahwa terdapat dua jenis admin, yakni admin biasa dan super admin, dengan tingkat akses yang berbeda, di mana super admin memiliki kewenangan lebih luas untuk melihat dan mengelola data. Temuan ini menunjukkan bahwa pada dimensi manajemen, khususnya indikator ketersediaan informasi, peran admin sangat menentukan dalam memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, seperti pimpinan dan pengguna sistem, tersedia secara tepat waktu, lengkap, dan akurat. Ketersediaan informasi ini menjadi prasyarat utama dalam pengambilan keputusan yang berbasis data, terutama dalam proses evaluasi

kinerja dan pengawasan kedisiplinan pegawai. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kejelasan peran admin perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan tata kelola manajemen sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah.

3.3. Dimensi Teknologi

Dimensi ini dapat dinilai dari beberapa indikator, yaitu teknologi manajemen data, telekomunikasi dan jaringan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA), fasilitas perangkat keras (hardware) dan lunak (software), serta infrastruktur teknologi informasi. Dalam proses analisis menggunakan NVivo 12 Plus, data yang telah diklasifikasikan ke dalam dimensi teknologi diolah dengan memanfaatkan fitur *Word Frequency Query*. Adapun hasil dari olahan data tersebut disajikan sebagai berikut:

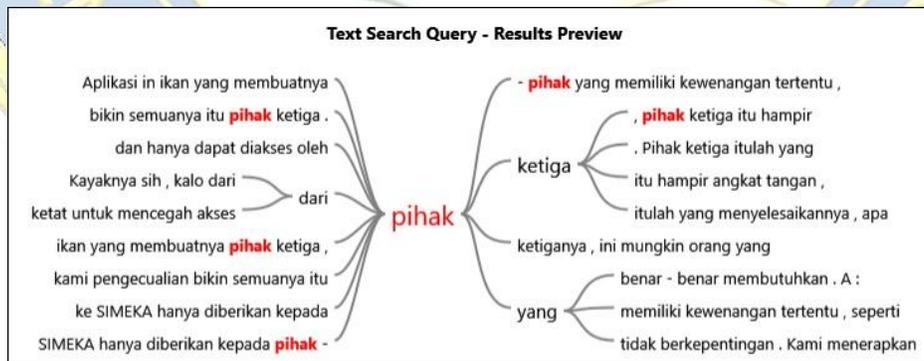
| Word | Length | Count | Weighted Percentage (%) |
|-------------|--------|-------|-------------------------|
| pihak | 5 | 9 | 1,00 |
| atasan | 6 | 7 | 0,78 |
| penggunaan | 10 | 7 | 0,78 |
| sistem | 6 | 7 | 0,78 |
| bkpsdm | 6 | 6 | 0,67 |
| daerah | 6 | 6 | 0,67 |
| jaringan | 8 | 6 | 0,67 |
| menegur | 7 | 6 | 0,67 |
| menggunakan | 11 | 6 | 0,67 |
| simpeg | 6 | 6 | 0,67 |
| akses | 5 | 5 | 0,56 |

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12 Plus (2025)

Gambar 2.6

Word Frequency Query Dimensi Teknologi

Berdasarkan Gambar 2.6, kata “pihak” muncul sebagai kata yang paling dominan dengan persentase sebesar 1,00%, diikuti oleh kata “atasan” sebanyak 0,78%, kemudian “Penggunaan” dan “Sistem” masing masing sebesar 0,78%, serta kata “BKPSDM” sebesar 0,67%, dan kata kata lainnya. Hasil analisis ini diperoleh dari pengolahan berbagai sumber data, antara lain wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber-sumber pendukung lainnya.



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12 Plus (2025)

Gambar 2.7

Text Search Query Kata Pihak pada Dimensi Teknologi

Berdasarkan Gambar 2.7 yang merupakan hasil analisis menggunakan fitur *Text Search Query* pada perangkat lunak NVivo 12 Plus, teridentifikasi bahwa kata “pihak” merupakan istilah yang paling dominan muncul dalam konteks pembahasan terkait sistem aplikasi SIMEKA. Data menunjukkan bahwa akses terhadap aplikasi tersebut dibatasi secara selektif, hanya diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki otorisasi dan kewenangan tertentu, sedangkan pihak ketiga yang tidak berkepentingan dibatasi aksesnya demi menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Temuan ini dapat dikaitkan dengan dimensi teknologi, khususnya pada indikator teknologi manajemen data, telekomunikasi dan jaringan, fasilitas perangkat keras dan lunak, serta infrastruktur teknologi informasi (TI). Pengaturan otorisasi akses dalam sistem menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait telah menerapkan sistem manajemen data yang memanfaatkan teknologi secara optimal untuk menjaga integritas, keamanan, dan efisiensi alur informasi. Selain itu, penerapan batasan akses hanya kepada pihak tertentu menandakan bahwa sistem tersebut telah didukung oleh perangkat keras dan lunak yang memadai, serta infrastruktur jaringan dan komunikasi digital yang memungkinkan pengendalian akses secara terstruktur dan real-time. Dengan demikian, dimensi teknologi dalam pengelolaan sistem informasi kepegawaian telah diimplementasikan secara strategis untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA) di BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya efektif. Meskipun terdapat kontribusi positif terhadap peningkatan kedisiplinan pegawai dan efisiensi administrasi, berbagai kendala seperti keterbatasan literasi digital, gangguan teknis jaringan, serta manipulasi presensi masih menjadi tantangan utama.

Sama halnya dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Fridson Yudha Samula (Samula, 2023) di Provinsi Maluku, bahwa penerapan SIMPEG dinilai cukup efektif namun masih menghadapi kendala pada aspek kesadaran pegawai dalam memperbarui data. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa keberhasilan sistem informasi kepegawaian sangat bergantung pada partisipasi aktif pengguna. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlianti di Kota Jambi, yang menunjukkan bahwa penerapan SIMPEG sudah berjalan efektif secara menyeluruh. Dalam konteks ini, temuan penelitian ini menolak generalisasi bahwa sistem informasi kepegawaian selalu efektif, karena terdapat perbedaan karakteristik antar daerah, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan kompetensi SDM (Nurlianti, 2023). Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Wilda Maulida, Rudiana, dan Jajang Sutisna (Maulida and Sutisna, 2023) yang menilai bahwa implementasi SIMPEG di Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan efektif karena masih banyak pegawai yang belum memahami penggunaan sistem, serta belum optimalnya pemanfaatan fitur-fitur aplikasi. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian ini, seperti masih adanya klaim presensi yang tidak valid akibat kesalahan teknis dan kurangnya pemahaman pengguna terhadap prosedur aplikasi SIMEKA. Selain itu, hal serupa juga ditemukan pada hasil penelitian oleh Angela Apulliza (Angela Apulliza, 2021) di Dinas Perhubungan Kota Bandung, yang menyebutkan rendahnya pemahaman pegawai terhadap aplikasi SIMPEG menjadi penyebab utama tidak optimalnya sistem. Hal ini konsisten dengan kondisi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana ketidaksesuaian klaim kehadiran oleh pegawai menunjukkan kurangnya pemahaman teknis dalam penggunaan aplikasi SIMEKA. Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan perbedaan signifikan dengan penelitian oleh Zulfan Aprian (2022) di Kota Pekanbaru, yang menilai penerapan SIMPEG sudah

sangat efektif, khususnya dari aspek kepuasan kerja dan tanggung jawab. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui karakteristik geografis dan tingkat kemajuan digital di masing-masing daerah yang memengaruhi kualitas implementasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan fokus pada SIMEKA sebagai sistem yang relatif baru diterapkan (2022), serta penggunaan teori Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon yang menekankan pada dimensi organisasi, manajemen, dan teknologi informasi.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu gangguan jaringan internet, manipulasi presensi dengan Fake GPS, serta kendala bagi pegawai di daerah terpencil, terutama guru yang harus kembali ke lokasi kerja untuk absen. Meskipun jaringan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanjung Jabung relatif stabil, gangguan teknis juga terkadang masih terjadi.

III. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya efektif. Pada dimensi organisasi, SIMEKA telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan disiplin dan efisiensi administrasi kepegawaian, namun masih terkendala oleh keterbatasan kesiapan sumber daya manusia, khususnya pada tahap awal implementasi dan pada pegawai senior, serta kurangnya pelatihan yang berkelanjutan. Pada dimensi manajemen, ketersediaan data dinilai telah dikelola dengan baik, terstruktur, dan mendukung pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja secara lebih objektif. Namun, pada dimensi teknologi, meskipun terdapat infrastruktur dan jaringan yang cukup stabil serta perangkat keras dan lunak yang memadai, efektivitas sistem masih terhambat oleh rendahnya literasi digital pengguna, keterbatasan pendampingan teknis, serta perlunya penguatan sistem keamanan untuk mengantisipasi risiko siber. Dengan demikian, SIMEKA telah menunjukkan potensi dalam mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi manajemen kepegawaian, namun efektivitas secara menyeluruh masih membutuhkan penguatan di berbagai aspek agar dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan waktu dan biaya menjadi faktor utama yang memengaruhi ruang lingkup penelitian. Kedua, penelitian hanya dilakukan pada satu instansi, yaitu BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke seluruh OPD atau daerah lain. Ketiga, jumlah dan variasi informan yang terbatas menyebabkan beberapa perspektif tidak tergalikan secara menyeluruh. Terakhir, pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan bersifat eksploratif, sehingga belum mampu memberikan gambaran kuantitatif yang terukur secara statistik.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal dan terbatas pada satu instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi atau instansi lain yang juga menerapkan sistem informasi kepegawaian serupa. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas SIMEKA atau aplikasi sejenis di

berbagai konteks kelembagaan, serta membandingkan tingkat keberhasilan implementasinya secara lebih luas. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau mixed methods juga dapat digunakan untuk menghasilkan data yang lebih terukur dan generalisabel.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Angela Apulliza, R.M.A.T. (2021) 'Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam Penginputan Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021', *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 4, pp. 132–141.
- Asri, S.K. and Julisman, I. (2022) 'Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Philips terhadap Minat Beli Konsumen pada Yogya Garnd Majalengka', *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), pp. 282–287. Available at: <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.40>.
- Hermawan, K.T., Pusparani, I.G. and Solihudin, D. (2023) 'Transformasi Digital Layanan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Cirebon: Studi Kasus Kebijakan Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan (SAMPEAN)', *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), pp. 13–26. Available at: <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.13-26>.
- Hooda, A. *et al.* (2022) 'The effects of trust on behavioral intention and use behavior within e-government contexts', *International Journal of Information Management*, 67, p. 102553. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102553>.
- Ika Sartika, A. (2023) 'Kepemimpinan Pemerintahan dalam Transformasi Digital di Kabupaten Sumedang', *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), pp. 222–236.
- Ismail, A., Anggoro, M.Y.A.R. and Daweng, M. (2024) 'Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dinas Pendidikan', *Journal of Management and Innovation Entrepreneursip (JMIE)*, 1, p. 4.
- Maulida, W. and Sutisna, J. (2023) 'Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021', *Wilda Maulida*, 3(1).
- Nugraha, J.T. (2018) *E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)*. Sleman.
- Nurdin, I. and Hartati, S. (2019) *Metodologi Penelitian Sosial*. Edited by Lutfiah. Media Sahabat Cendekia.
- Nurlianti (2023) *Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Jambi*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin).
- Rodikin Amelinda Safera, E.I.A.A. (2022) 'Pengaruh Kualitas Website “Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)” Terhadap Kepuasan Pengguna Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pemalang', *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), pp. 80–96.
- Samula, F.Y. (2023) *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

- Valcik, N.A., Sabharwal, M. and Benavides, T.J. (2021) 'Existing Research on HRIS in Public Organizations', in, pp. 33–45. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-030-75111-1_3.
- Wang, Y.-S. and Liao, Y.-W. (2008) 'Assessing eGovernment systems success: A validation of the DeLone and McLean model of information systems success', *Government Information Quarterly*, 25(4), pp. 717–733. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.06.002>.
- Yang, J. and Wang, Y. (2020) 'Will the central-local disparity in public policy perceptions disappear? Evidence from 19 major cities in China', *Government Information Quarterly*, 37(4), p. 101525. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101525>.



